

KIA9_APJK_003

PENGARUH DIVERSITAS *GENDER* PADA DEWAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Stella Aurellia¹⁾, Elfina Astrella Sambuaga²⁾

¹⁾Universitas Pelita Harapan
email: sa80022@student.uph.edu

²⁾Universitas Pelita Harapan
email: elfina_sambuaga@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to empirically examine the effect of gender diversity on the board and audit quality on tax avoidance practices. Gender diversity on the board and audit quality are proxied by dummy variables, while tax avoidance is measured by ETR. This study utilizes secondary data as research data. The research sample was selected using a purposive sampling technique and the number of observations was 269 observations of manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period. The results showed that gender diversity on the board and audit quality had a significant effect on tax avoidance practices.

Keywords: *gender diversity, audit quality, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Umumnya komposisi keanggotaan dewan didominasi oleh laki-laki karena di masyarakat masih melekat pandangan bahwa seorang pemimpin hendaknya adalah laki-laki. Isu kesetaraan *gender* masih menjadi topik hangat dalam pembicaraan mengingat kesetaraan *gender* di Indonesia masih cukup rendah. Melalui website resmi Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengatakan kesetaraan *gender* merupakan hal penting dan pada level organisasi, kesetaraan *gender* menjadi salah satu kontribusi dalam memberikan perspektif yang menyeluruh atas sebuah masalah. Ini berarti diversitas *gender* memiliki makna penting dalam kehidupan, tidak hanya sebatas tentang kesetaraan *gender* melainkan tentang bagaimana diversitas *gender* mampu berkontribusi secara keseluruhan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Hoseini *et al.*, (2018), melalui kehadiran dewan wanita pada komposisi anggota dewan perusahaan dinilai mampu memberikan peningkatan efektivitas peran dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dan juga adanya upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan juga masyarakat. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Rhee *et al.* (2019) yang mengatakan bahwa wanita berkecenderungan meminimalisir risiko melalui pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati karena adanya penilaian yang mengatakan bahwa wanita lebih beretika ketimbang laki-laki (Ruegger dan King, 1992), sehingga hal tersebut dinilai mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan, serta menunjukkan adanya kontribusi diversitas *gender* pada dewan dalam memperketat fungsi pengawasan.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian Jarboui *et al.*, (2020), Riguen *et al.*, (2019), Hoseini dan Gerayli, (2018), dan Chen *et al.*, (2016) yang mengatakan jika diversitas *gender* pada dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya penghindaran pajak akan minim terjadi apabila perusahaan memiliki dewan wanita di dalamnya.

Kendati demikian, masih terdapat penelitian yang hasilnya bertentangan, seperti hasil penelitian Demos dan Muid, (2020), Prakoso dan Hudiwinarsih, (2018), dan Pangestu dan Bimo, (2018) yang mengatakan kehadiran dewan wanita tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Selain meningkatkan diversitas *gender* pada susunan dewan perusahaan, adapun upaya lain yang dinilai mampu untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak adalah dengan peningkatan kualitas audit. Auditor berperan sebagai pihak yang menyuarakan opininya atas kewajaran laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material di dalamnya. Melalui kualitas audit yang tinggi, maka perusahaan kurang termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak (Riguen *et al.*, 2019). Menurut Langli dan Willekens (2017), kredibilitas informasi keuangan akan meningkat apabila kualitas audit suatu perusahaan tinggi. Jika KAP *Big Four* mengaudit suatu perusahaan, maka kualitas audit yang dihasilkan tinggi sehingga mempermudah dalam mendeteksi adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan kompetensi auditor KAP *Big Four* yang tinggi dan baik (Rizqia dan Lastiati, 2021). Namun, hasil penelitian Ambarsari *et al.*, (2019) menunjukkan KAP *Big Four* belum terbukti mampu mengurangi agresivitas pajak perusahaan, ini artinya masih terdapat ketidakselarasan hasil penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kualitas audit.

Berpijak pada penjabaran sebelumnya, penelitian ini akan menguji secara empiris hubungan antara diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Terpilihnya sektor manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan peranannya besar pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Topik tersebut menjadi topik yang menarik untuk dikaji kembali mengingat penelitian terkait pengaruh diversitas *gender* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang beragam.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS *AGENCY THEORY*

Teori keagenan adalah konsep yang memaparkan adanya sebuah kesepakatan antara *agent* sebagai pihak yang bersedia untuk bertindak demi pihak lain (*principal*). Jensen dan Meckling, (1976) sebagai penggagas teori keagenan ini memberikan perspektif bahwa adanya perselisihan yang terjadi di antara dua belah pihak dalam perusahaan disebabkan oleh perbedaan kepentingan.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* terjadi karena keduanya adalah *homo economicus*, yang mana kedua pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan memiliki informasi yang asimetris (Pertiwi dan Prihandini, 2021). Asimetris informasi yang terjadi pada perusahaan tidak menutup kemungkinan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak diketahui oleh pihak *principal* (Schroeder *et al.*, 2013).

STAKEHOLDER THEORY

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pemberian manfaat bagi pemangku kepentingan dan melayani kepentingan perusahaan. Pihak yang dimaksud sebagai pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau dapat dipengaruhi oleh perusahaan dan berkepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, *supplier*, konsumen, kreditur, karyawan, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan (Benn *et al.*, 2016). Peran pemangku kepentingan bagi perusahaan adalah menentukan posisi perusahaan, oleh karena itu untuk mendapatkan bantuan dari pemangku kepentingan, penyediaan informasi terkait perusahaan harus disediakan oleh perusahaan itu sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Widuri *et al.*, 2020).

Pada teori pemangku kepentingan, kehadiran wanita dalam keanggotaan dewan perusahaan memberikan dampak positif bagi perusahaan dari segi pemikiran yang lebih inovatif dan meningkatkan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya diversitas *gender* pada dewan menunjukkan adanya upaya memaksimalkan nilai pemangku kepentingan (Rose, 2004). Oleh karena itu, kehadiran wanita dalam dewan berpengaruh bagi perusahaan dan juga pemangku kepentingan dalam perusahaan.

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance adalah serangkaian proses upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan investor pada perusahaan berperan penting sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang etis. Lingkungan bisnis yang etis akan tercipta apabila seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaan telah digiatkan dan diberdayakan untuk melakukan sesuatu yang benar. Bisnis yang etis merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, oleh karenanya perusahaan membutuhkan sebuah program kerja yang mampu memperlihatkan bahwa perusahaan (1) memiliki diversitas; (2) pemenuhan ekspektasi publik dan pemangku kepentingan; (3) lingkungan kerja yang profesional dan teratur dalam sebuah peraturan; dan (4) kepatuhan perusahaan terhadap hukum (Rezaee, 2009).

PERAN DEWAN DALAM PERUSAHAAN

Kehadiran dewan dalam perusahaan adalah suatu hal yang penting. Dewan merupakan representasi dari pemegang saham, di mana kepentingan pemegang saham tercermin dalam dewan, serta pihak yang menciptakan nilai bagi pemegang saham, maka dari itu pemegang saham memiliki hak untuk memilih dan mengganti dewan. Sebagai representasi dari pemegang saham, dewan berperan sebagai *gatekeeper* yang bertanggung jawab untuk melindungi investor dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, oleh karena itu dewan harus memiliki pemahaman yang baik atas perusahaan guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, bertanggung jawab untuk menghindari sebuah konflik yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Rezaee, 2009).

PENGHINDARAN PAJAK

Komponen terbesar dalam penerimaan suatu negara ialah penerimaan pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menegaskan, pajak adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan penggunaannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasan UU KUP, dikatakan juga bahwa imbalan atas pembayaran pajak itu diterima secara tidak langsung, sehingga dari segi wajib pajak melihat pajak dianggap sebagai beban dan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menghindari pajak agar perusahaan tetap menghasilkan laba bersih yang besar (Prakosa & Hudiwinarsih, 2018). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai efisiensi beban perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan cela dari Undang-Undang Perpajakan (Wisanggeni dan Suharli, 2017), sehingga tindakan tersebut tidak sepenuhnya melanggar hukum, kecuali penghindaran pajak dilakukan dengan cara menggelapkan pajak yang secara jelas merupakan hal ilegal.

DIVERSITAS GENDER PADA DEWAN

Menurut Arfken *et al.*, (2004), diversitas adalah salah satu hal penting dalam perkembangan bisnis. Melalui diversitas pada fungsi organisasi maka terjadi keragaman pada ide dan pengalaman organisasi

sehingga berdampak baik pada perusahaan. Diversitas dewan juga dinilai mampu menjadi sebuah representatif suatu perusahaan sehingga meningkatkan potensi perusahaan untuk semakin dikenal. Salah satu bentuk diversitas pada perusahaan adalah adanya kehadiran wanita dalam keanggotaan dewan. Diversitas *gender* pada dewan diharapkan mampu memperkaya solusi atas masalah yang terjadi di perusahaan, hal ini dilatarbelakangi dengan beragamnya karakter dan motivasi individu dalam perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun tindakan yang diambil sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi (*attribution theory*) yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958).

Menurut Brammer *et al.*, (2007), kehadiran komisaris dan direksi wanita menunjukkan adanya emansipasi wanita dalam perusahaan, serta memberikan peningkatan reputasi dan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Peningkatan jumlah anggota dewan wanita pada perusahaan, sama saja dengan meningkatkan perhatian perusahaan atas masalah etis dan lingkungan (Bernardi dan Threadgill, 2010). Baldry (1987) dalam Hoseini *et al.*, (2018) mengatakan bahwa dewan wanita sangat memperhatikan keseimbangan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan masyarakat melalui perubahan organisasi dengan cara menyediakan struktur organisasi yang ketat namun fleksibel secara gaya kepemimpinan, menekankan pada poin kepercayaan, kerjasama, *control*, serta adanya kecenderungan wanita untuk lebih mendengar, memotivasi, dan mendukung dibandingkan pria (Prakoso dan Hudiwinarsih, 2018) oleh karena itu wanita dinilai mampu mengambil keputusan yang lebih baik daripada pria guna meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Dalam hal perpajakan, Hoseini *et al.*, (2018) mengungkapkan bahwa kehadiran dewan wanita mampu meningkatkan performa kinerja dewan. Hasil penelitiannya mengatakan kehadiran wanita mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak dikarenakan wanita mampu mengefektifkan fungsi *monitoring*. Peningkatan fungsi *monitoring* oleh dewan wanita dapat membantu mengatasi masalah agensi (Jarboui *et al.*, 2020). Rhee *et al.*, (2019) mengatakan minimnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan tingginya komposisi pegawai wanita sebab kecenderungan wanita adalah *risk-aversion*, artinya wanita akan mengambil keputusan dengan risiko yang kecil untuk menghindari permasalahan di lain waktu dan juga dari segi sikap wanita bersikap lebih tegas untuk masalah penghindaran pajak (Fallan, 1999).

KUALITAS AUDIT

PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernest dan Young (EY), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) dikenal sebagai empat Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia (*The Big Four*). DeAngelo (1981) berpendapat bahwa semakin besar Kantor Akuntan Publik, maka semakin kecil kemungkinan auditor akan bertindak oportunistik dengan demikian kualitas audit yang dihasilkan akan tinggi. Menurut Nadia (2015), KAP *Big Four* memiliki auditor yang profesional dan independen yang memungkinkan mereka menghasilkan kualitas audit yang baik. KAP berskala besar dituntut untuk memiliki auditor yang berkompetensi guna mendeteksi indikasi manipulasi data untuk tujuan penghindaran pajak (Nadia, 2015). Objektif yang ingin dicapai dari kualitas audit adalah peningkatan kualitas laporan keuangan agar meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dikarenakan adanya independensi dan transparansi dari pelaporan tersebut yang mana transparansi merupakan bagian dari prinsip *corporate governance* (Lestari & Nedy, 2019).

PENGARUH DIVERSITAS *GENDER* PADA DEWAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Diversitas *gender* pada dewan dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan melalui keberagaman latar belakang, pengalaman, ide, dan sebagainya sehingga mampu memberikan beragam solusi dalam menyelesaikan masalah. Kehadiran wanita dalam susunan dewan dinilai mampu meningkatkan fungsi *monitoring* dewan melalui etika kerja wanita yang berusaha untuk melindungi citra perusahaan dan membuat perusahaan terhindar dari kewajiban legal (Riguen *et al.*, 2019).

Menurut Nehme dan Jizi, (2018), prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme yang dipegang dewan wanita berkecenderungan untuk meminimalisir risiko perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan menurunkan risiko praktik penghindaran pajak (Hoseini *et al.*, 2018). Oleh karena itu, dengan perusahaan memiliki diversitas *gender*, maka ada upaya untuk memaksimalkan nilai pemangku kepentingan (Rose, 2004). Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingannya apabila praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan itu minim. Berlandaskan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa:

H1 : Diversitas *Gender* pada Dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Suatu perusahaan membutuhkan pihak ketiga yang independen dalam menyampaikan opininya atas kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan rasa percaya investor terhadap perusahaan. Menurut DeAngelo, (1981), kualitas audit akan lebih baik jika perusahaan diaudit oleh KAP seperti *Big Four* daripada yang *Non-Big Four*. Penelitian terdahulu seperti Rizqia dan Lastiati, (2021), Lestari dan Nedy, (2019), dan Khairunisa *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan auditor yang bekerja di KAP *Big Four* berkompentensi tinggi yang didukung dengan pengalaman dan keahliannya sehingga lebih mudah untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak.

Transparansi perusahaan dapat ditingkatkan melalui kualitas audit yang tinggi. Peningkatan transparansi dalam perusahaan menunjukkan bahwa prinsip *corporate governance* di perusahaan telah diterapkan dengan baik. Dengan demikian, kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil. Berlandaskan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa:

H2 : Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

MODEL PENELITIAN

Model empiris yang diterapkan dalam penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki pengaruh diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan satu model penelitian yang dinyatakan sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = \alpha + \beta_1 BGD_{i,t} + \beta_2 AQ_{i,t} + \beta_3 FirmSize_{i,t} + \beta_4 Profit_{i,t} + \beta_5 Lev_{i,t} + \varepsilon$$

Keterangan :

- ETR : Penghindaran pajak (*Income tax expense / pre-tax income*)
- BGD : *Board Gender Diversity* (1 jika ada wanita, 0 jika lainnya)
- AQ : *Audit Quality* (1 jika menggunakan KAP *Big Four*, 0 jika lainnya)
- FirmSize : Ukuran Perusahaan (Logaritma Natural Total Asset)
- Profit : Profitabilitas (*Net Income / Total Asset*)
- Lev : *Leverage* (*Total Debt / Total Equity*)

OPERASIONAL VARIABEL

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Effective Tax Rate (income tax expense/pre-tax income)* dalam mengukur penghindaran pajak, seperti penelitian Widuri *et al* (2020). Apabila nilai dari *Effective Tax Rate* yang dihasilkan tinggi, maka semakin rendah penghindaran pajaknya, dan sebaliknya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu diversitas gender dan kualitas audit, sementara ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* menjadi variabel kontrol. Diversitas *gender* pada dewan adalah salah satu contoh diversitas yang dimiliki perusahaan karena melalui kehadiran wanita dalam dewan perusahaan, perusahaan memiliki beragam cara pandang dan juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan melalui sikap wanita yang cenderung *risk-aversion*. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan akan diberikan angka (1) apabila terdapat dewan wanita di dalam perusahaan dan apabila suatu perusahaan tidak didapati memiliki anggota dewan wanita, maka perusahaan akan mendapatkan angka (0). Kualitas audit seringkali disangkutpautkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut DeAngelo, (1981), semakin besar ukuran KAP, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Penerapan variabel *dummy* pada kualitas audit dilakukan dengan cara memberikan angka (1) untuk perusahaan yang diaudit oleh salah satu KAP *Big Four*. Sementara angka (0) akan diberikan kepada perusahaan yang tidak diaudit oleh salah satu *The Big Four*.

Untuk menghitung ukuran perusahaan, peneliti menggunakan logaritma natural total aset, profitabilitas menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, dan untuk *leverage* menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio*.

METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menerapkan metode analisis kuantitatif, di mana seluruh data yang telah diperoleh dikuantifikasi agar peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan. Perangkat lunak statistik yang digunakan adalah IBM SPSS versi 25. Pengolahan data meliputi uji statistik deskriptif, uji korelasi, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, uji F, uji t, dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN POPULASI DAN SAMPEL

Tabel 1. Kriteria Sampel

N o	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur selama periode penelitian	152
2	Jumlah sampel selama 3 tahun periode (2017-2019)	456
3	Perusahaan yang <i>delisting</i> selama periode 2017-2019	(18)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2017-2019	(135)
5	Perusahaan yang tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan	(27)
6	Data <i>Outlier</i>	(7)
Jumlah Sampel Observasi Akhir		269

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2021)

Sampel penelitian ini memanfaatkan 152 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019. Sesuai dengan kriteria *purposive sampling* yang dijelaskan

pada Tabel 1, terdapat 269 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria secara penuh dan peneliti mengeluarkan sebanyak 7 sampel yang merupakan data *outlier*.

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yakni, ETR sebagai proksi pengukuran dari praktik penghindaran pajak. Tabel 2 menunjukkan hasil tabulasi dari perangkat lunak SPSS 25. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah observasi (N) sebanyak 269 sampel. Berdasarkan hasil tabel tabulasi tersebut, nilai ETR terkecil adalah 2,03% dan nilai terbesar untuk variabel ETR adalah 69,62% dengan rerata nilai ETR sebesar 26,97%. Nilai rerata tersebut telah melebihi tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yakni 25%, hal ini mencerminkan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia minim melakukan praktik penghindaran pajak.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std
ETR	2	0,0203	0,6962	0,2697	0,099
	6				
BGD	9	0	1	0,68	0,466
	2				
AQ	6	0	1	0,40	0,490
	9				
Profit	2	0,0002	0,5267	0,0785	0,0841
	6				
Lev	9	0	2,0593	0,4431	0,4547
	2				
FirmSize	6	12,1391	19,5052	15,069	1,5846
	9				

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2021)

Dua variabel independen pada penelitian ini adalah BGD sebagai proksi dari variabel diversitas *gender* pada dewan dan AQ sebagai proksi kualitas audit. Kedua variabel independen ini menggunakan variabel *dummy* sebagai pengukurannya. Variabel BGD yang merepresentasikan diversitas *gender* pada dewan akan mendapatkan angka (0) jika di dalam perusahaan tidak terdapat anggota dewan wanita di dalam perusahaan. Angka (1) akan diberikan apabila perusahaan memiliki anggota dewan wanita di dalam perusahaan. Pada tabel 2, membuktikan bahwa nilai rerata untuk variabel diversitas *gender* pada dewan sebesar 68%, dengan kata lain 68% dari 269 sampel telah memiliki keragaman pada komposisi anggota dewannya dan hanya 32% dari 269 sampel yang belum memiliki keragaman pada komposisi anggota dewannya.

Variabel AQ merupakan variabel *dummy* sebagai proksi kualitas audit. Perusahaan akan mendapatkan skor (0) jika menggunakan KAP *Non-Big Four* dan akan mendapatkan skor (1) apabila menggunakan KAP *Big Four*. Nilai rata-rata yang dapat dilihat pada tabel hasil tabulasi sebesar 0,40 (40%), ini

artinya sebanyak 40% dari 269 sampel yang menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditornya, sementara 60% lainnya menggunakan KAP *Non-Big Four* sebagai auditornya.

HASIL PENGUJIAN

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Arah Hipotesis	Koefisien Beta	Sig (<i>One-Tailed</i>)
Variabel Dependen			
ETR			
Variabel Independen			
BGD (H1)	-	0,018	0,084*
AudQ (H2)	-	0,029	0,0215**
Variabel Kontrol			
Profit		-0,323	0,000***
Lev		0,002	0,453
FirmSize		-0,004	0,15
N			269
R Square			0,075
<i>Adjusted</i> R Square			0,058
Prob > F			0,001
*Signifikan pada level 10%			
**Signifikan pada level 5%			
***Signifikan pada level 1%			

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2021)

Hasil *Adjusted R²* yang diperoleh adalah sebesar 0,058 atau sebesar 5,8%. Angka tersebut menandakan bahwa kemampuan diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit, serta *return on asset*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mampu menerangkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak hanya sebesar 5,8%, sedangkan 94,2% dijelaskan oleh variabel di luar model. Sesuai hasil tabel 3, uji model pada penelitian ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 yang nilainya di bawah 0,05, dengan demikian model penelitian ini valid dan variabel independen dalam penelitian ini secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen.

Hasil tabulasi 3 membuktikan jika BGD berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ETR dengan nilai p-value *one-tailed* 0,084 atau signifikan pada level 10%. Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki makna yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, artinya semakin tinggi nilai ETR yang dihasilkan maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Dengan demikian, secara statistik terbukti bahwa dengan adanya diversitas *gender* pada dewan perusahaan, maka akan menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Maka, H1 yang didukung dengan data penelitian diterima.

Variabel AQ yang melambangkan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ETR dengan p-value sebesar *one-tailed* 0,0215 (signifikan pada level 5%). Hasil tersebut membuktikan semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, KAP *Big Four* sebagai pihak ketiga yang menilai kewajaran pelaporan keuangan akan melakukan penilaian secara objektif atas pelaporan yang perusahaan lakukan guna memastikan apakah laporan keuangan yang telah disusun perusahaan itu

layak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini dari auditor merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan dikarenakan opini tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik atas perusahaan, oleh sebab itu, guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan mengupayakan transparansi agar laporan keuangan yang dilaporkan merepresentasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya, termasuk jumlah beban pajak perusahaan.

PENGARUH DIVERSITAS GENDER PADA DEWAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Sesuai dengan hasil uji t, secara statistik terbukti bahwa diversitas *gender* pada dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarboui *et al.*, (2020), Riguen *et al.*, (2019), Hoseini dan Gerayli, (2018), dan Chen *et al.*, (2016). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang memiliki keterbukaan dan kepedulian terhadap isu *gender* akan berupaya untuk meningkatkan dan memberdayakan wanita dalam perusahaannya. Dari segi *corporate governance*, diversitas *gender* pada dewan merupakan cerminan tanggung jawab moral perusahaan kepada masyarakat yang mana menegaskan bahwa perusahaan terbuka akan kepemimpinan wanita. Jika suatu perusahaan memiliki dewan wanita, maka penyelesaian masalah pada suatu perusahaan dapat dilakukan secara menyeluruh melalui pendapat yang disuarakan oleh dewan wanita. Heterogenitas dalam komposisi dewan menunjukkan adanya keberagaman pemikiran yang dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik. Standar etika yang dipegang oleh dewan wanita menunjukkan bahwa kehadiran wanita pada perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pengambilan keputusan, hal ini dikarenakan dewan wanita cenderung menghindari risiko serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan, spesifiknya pada kasus ini pemerintah. Oleh karena itu dewan wanita akan mengoptimalkan fungsi pengawasan demi memastikan perusahaan telah mematuhi regulasi yang berlaku dan bersikap kooperatif dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain itu, jika suatu perusahaan terlalu sering melakukan penghindaran pajak, tentu akan menarik perhatian otoritas pajak yang nantinya akan berujung pada pemeriksaan. Oleh sebab itu, dewan wanita akan berupaya meminimalisir praktik penghindaran pajak bukan serta merta hanya untuk merepresentasikan kepentingan pemangku kepentingan saja, tetapi juga untuk meminimalisir permasalahan yang sebenarnya dapat dihindari agar tidak menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus masalah tersebut. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah perusahaan yang memiliki diversitas *gender* pada dewan adalah bagian dari *good corporate governance* yang mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, baik dari segi perpajakan maupun tata kelolanya.

PENGARUH KUALITAS AUDIT PADA PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Secara statistik terbukti jika kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil penelitian menegaskan bahwa dengan tingginya kualitas audit suatu perusahaan akan semakin meminimalisir praktik penghindaran pajaknya. Hasil ini selaras dan mendukung hasil penelitian Rizqia dan Lastiati, (2021), Lestari dan Nedy, (2019), dan Khairunisa *et al.*, (2017). Kualitas audit diukur melalui melihat apakah perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* atau *Non Big Four*. KAP *Big Four* merupakan KAP terbesar di dunia dan dikenal sebagai KAP terbaik. Opini ini didukung dengan fakta yang diungkapkan dalam penelitian Nadia, (2015) bahwa KAP berskala besar akan dituntut untuk memiliki auditor yang

kompeten agar mempermudah mendeteksi adanya indikasi manipulasi laba yang dilakukan perusahaan guna untuk menghindari pajak.

Dalam *corporate governance*, auditor merupakan salah satu pemangku kepentingan perusahaan, yang artinya auditor dapat mempengaruhi perusahaan. Peran auditor dalam perusahaan adalah sebagai pihak ketiga yang mengeluarkan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, opini inilah yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan perusahaan terhadap perusahaan. Hal tersebut akan membuat perusahaan berupaya dalam meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangannya agar ketika diaudit perusahaan dapat menerima opini wajar tanpa pengecualian. Namun selain untuk mendapatkan opini tersebut, transparansi tersebut sebenarnya juga berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan publik khususnya pemerintah, di mana jika perusahaan dengan transparansi yang baik, maka perusahaan tidak akan melakukan tindak kecurangan yang bertujuan untuk menghindari pajak dan ini menunjukkan secara tidak langsung kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Sesuai hasil observasi pada 269 perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019, dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir melalui diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit perusahaan. Diversitas dalam perusahaan merupakan hal yang baik dan termasuk bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Diversitas *gender* pada dewan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan membuka peluang bagi para wanita untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya dan dari hasil penelitian terbukti bahwa perusahaan dengan diversitas *gender* pada dewan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik, terutama dari segi kepatuhan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa dewan wanita mampu merepresentasikan kepentingan pemerintah pada perusahaan.

Implikasi penelitian ini mengacu pada keberadaan dewan wanita di perusahaan sektor manufaktur di Indonesia sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi komposisinya. Sementara untuk kualitas audit peneliti menyimpulkan bahwa KAP *Big Four* merupakan KAP yang terpercaya dan relevan untuk kebutuhan perusahaan, serta untuk dari segi kepatuhan dapat dilihat bahwa perusahaan cenderung patuh apabila diaudit oleh KAP *Big Four*. Salah satu perwujudan tata kelola yang baik bagi perusahaan adalah dengan peningkatan kualitas audit sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaudit laporan keuangan. KAP *Big Four* sebagai pihak ketiga yang independen dipercaya mampu memberikan opini atas laporan keuangan suatu perusahaan secara objektif dan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar, oleh karena itu KAP *Big Four* sebagai auditor sangat berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan

perusahaan. Laporan keuangan yang wajar dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan secara transparan dan kooperatif dengan segala regulasi yang berlaku, terutama untuk segi perpajakannya. Dengan demikian, KAP *Big Four* mampu memastikan kepatuhan suatu perusahaan atas kewajibannya sebagai wajib pajak badan melalui proses audit yang dilaksanakan secara profesional dan objektif.

Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak lolosnya dua uji asumsi klasik normalitas dan heteroskedastisitas pada model penelitian, dan beberapa variabel yang hanya menggunakan variabel *dummy*. Untuk itu, peneliti selanjutnya adalah menggunakan proksi lain dalam pengukuran diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit. Proksi yang dapat digunakan untuk mengukur diversitas *gender* pada dewan adalah menghitung proporsi dewan wanita pada perusahaan dan untuk kualitas audit dapat

diukur dengan audit *delay* atau audit *tenure*. Serta untuk memperkaya penelitian terkait penghindaran pajak, peneliti selanjutnya dapat mencoba menambah variabel independen baru seperti *transfer pricing* dan *corporate social responsibility*

Untuk meningkatkan kualitas penelitian berkaitan dengan topik diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit, saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah menggunakan sektor lain seperti pertanian, pertambangan, dan jasa sebagai sampel penelitian. Tujuannya untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait praktik penghindaran pajak di Indonesia pada setiap sektor industri.

REFERENSI

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, *Gender Diversity* pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 142–157. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.3809>
- Arfken, D. E., Bellar, S. L., & Helms, M. M. (2004). The ultimate glass ceiling revisited: The presence of women on corporate boards. *Journal of Business Ethics*, 50(2), 177–186. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000022125.95758.98>
- Benn, S., Abratt, R., & O’Leary, B. (2016). Defining and identifying stakeholders: Views from management and stakeholders. *South African Journal of Business Management*, 47(2), 1–11. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55>
- Bernardi, R., & Threadgill, V. (2010). Women Directors and Corporate Social Responsibility. *Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies*, 15(2), 15–21.
- Brammer, S., Millington, A., & Rayton, B. (2007). The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment. *International Journal of Human Resource Management*, 18(10), 1701–1719. <https://doi.org/10.1080/09585190701570866>
- Chen, L. H., Gramlich, J., & Houser, K. A. (2016). The effects of board *gender* diversity on a firm’s risk strategies. *Accounting and Finance*, 59(2), 991–1031. <https://doi.org/10.1111/acfi.12283>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit fees. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Demos, R. W., & Muid, D. (2020). Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1), 1–7.
- Fallan, L. (1999). *Gender*, exposure to tax knowledge, and attitudes towards taxation; an experimental approach. *Journal of Business Ethics*, 18(2), 173–184. <https://doi.org/10.1023/A:1005711905297>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley
- Hoseini, M., & Gerayli, M. S. (2018). The presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 53–62.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2018). Demographic characteristics of the board of directors’ structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board *gender* diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019, April 24). *Ini Pentingnya Kesetaraan gender Untuk Sebuah Negara*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pentingnya-kesetaraan-gender-untuk-sebuah-negara/>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Langli, J. C., & Willekens, M. (2017). Tax Avoidance , Horizontal Agency Conflicts and High-Quality Auditing in Private Firms. *Scandinavian Accounting Research Conference*.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019). The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance. *Advance in Social Science, Education, and Humanities Research*, 354(iCASTSS), 329–333. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.69>
- Nadia, N. F. (2015). Pengaruh Tenur Kap, Reputasi Kap Dan Rotasi Kap Terhadap Kualitas Audit Nurul Fitri Nadia 2. *Jurnal Akuntansi Bisnis, XIII*(26), 113–130.
- Nehme, R., & Jizi, M. (2018). The efficiency of corporate boards and firms' audit fees: the case of the FTSE financial institutions. *Pacific Accounting Review*, 30(3), 297–317. <https://doi.org/10.1108/PAR-12-2016-0116>
- Pangestu, S., & Bimo, I. D. (2018). The Determinants and Consequences of Tax Avoidance in Indonesia:the Effects of Top Management Characteristics and Capital Structure. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 94–109. <https://doi.org/10.21632/saki.1.2.94-109>
- Pertiwi, S. R., & Prihandini, W. (2021). Gender Diversity As The Moderating Effect On Tax Avoidance, Economic Value Added, And Firm Value: A Study Of Companies Listed On Indonesia Stock Exchange 2015-2019 Sesilia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(1), 241–255.
- Prakosa, I. B., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Variables that Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>
- Rezaee, Z. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. John Wiley & Sons.
- Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2019). The effect of female employment on corporate sustainability in terms of tax avoidance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su12010140>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarbou, A. (2019). Do Women in Board Represent Less Corporate Tax Avoidance? A Moderation Analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(7–8), 659–675. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0212>
- Rizqia, A., & Lastiati, A. (2021). Audit Quality and Tax Avoidance: The Role of Independent Commissioners and Audit Committee's Financial Expertise. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.29642>
- Rose, C. (2004). Stakeholder orientation vs. shareholder value - A matter of contractual failures. *European Journal of Law and Economics*, 18(1), 77–97. <https://doi.org/10.1023/B:EJLE.0000032771.22551.58>
- Ruegger, D., & King, E. W. (1992). A Study of the Effect of Age and Gender upon Student Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 11(3), 179–186.

- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2013). *Financial Accounting Theory and Analysis (11th Edition)*. Willey.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Widuri, R., Tjahjono, P. A., Felicia, V. R. A., & Fudianto, M. (2020). Female Board Membership and Sustainability: Can they Mitigate Tax Avoidance in Indonesia and Malaysia? *Advance in Economics, Business, and Management Research*, 158(Teams), 296–304. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.042>
- Wisanggeni, I., & Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Mitra Wacana Media